



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SADIMIN
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 624635

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.001.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 106 m2/69 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 51.000.000
3. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/36 m2 di KAB / KOTA PEMALANG, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000
5. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **129.500.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
2. MOBIL, YARIS MINI BUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY F1CO2N16L2A/T Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **7.800.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **24.900.000**



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.163.200.000

III. HUTANG

Rp. 54.378.750

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.108.821.250

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.